

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan (Zainuddin, 2008: 125). Proses menunjukkan adanya aktivitas dalam bentuk tindakan aktif di mana terjadi suatu interaksi yang dinamis dan dilakukan secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena tindakan pendidikan selalu bersifat aktif dan terencana, maka pendidikan merupakan suatu perbuatan atau tindakan sadar agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan yaitu pemanusiaan manusia yang cerdas, terampil, mandiri, berdisiplin dan berakhlak mulia. Sudah banyak pembicaraan yang mengatakan bahwa tidaklah mungkin mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan pengorbanan yang kecil, dengan dalil ekonomi yang mengatakan bahwa dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya diperoleh hasil yang sebesar-besarnya untuk kasus pendidikan kurang mengenai, atau bahkan tidak sesuai. Untuk proses pendidikan juga diperlukan alat, tempat, yang semuanya memerlukan pengorbanan.

Pengorbanan yang kemudian diartikan menjadi biaya menjadi faktor yang tidak mungkin diabaikan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu dapat

diperkirakan bagaimana sulitnya seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomis untuk akses pada pendidikan yang bermutu. Hal ini tidak berarti bahwa hanya orang kaya yang akan memperoleh pendidikan, di sini letak peranan pemerintah untuk membangkitkan peran masyarakat dalam arti luas untuk ikut ambil bagian dalam proses pendidikan.

Dunia pendidikan kita kini telah banyak mengalami sejumlah perubahan. Salah satunya adalah perubahan pada sistem pembiayaan pendidikan baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sebelum diterapkan otonomi daerah bersifat sentralistik. Kini dengan diberlakukannya otonomi daerah, dibutuhkan dukungan *stakeholder* baik dunia usaha/industri, orang tua siswa/keluarga, pemerintah, maupun komponen lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, rintisannya telah dimulai sejak tahun anggaran 1999/2000 melalui dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ). Mulai tahun anggaran 2003, dana BOMM diberikan dalam bentuk lain, yaitu dana rintisan MPMBS, khususnya untuk pendidikan jenjang SMA. Dalam beragam tafsir, MBS muncul dan disambut cukup antusias oleh teoritis dan praktisi pendidikan sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia, mengikuti kebijakan otonomi daerah. Tafsir atasnya masih bervariasi dan manifestasinyaapun dipastikan akan muncul dengan beberapa wajah, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, komitmen pembuatan keputusan, dan

potensi sekolah. Fenomena ini terutama muncul dalam kerangka pengelolaan sekolah-sekolah milik pemerintah. Sementara pada sekolah swasta, MBS itu telah berjalan terutama dibidang penganggaran dan ketenagaan (Danim, 2006:140).

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Mulyasa, 2007: 47). Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.

Berkaitan dengan penganggaran, disadari sepenuhnya bahwa operasi institusi pendidikan persekolahan belum didukung oleh pendanaan yang memadai, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.

Secara teoritis, upaya komite sekolah untuk mengimplementasikan peran dan fungsinya dalam menggali dukungan dana pendidikan memiliki korelasi positif dengan kemampuan keuangan *stakeholders* yang ada di lingkungan sekolah.

Beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit.

Salah satu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di sekolah adalah pengelolaan APBS. Dalam satu tahun kalender pendidikan, APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) harus dapat mencerminkan seluruh kebutuhan sekolah. APBS merupakan rincian anggaran yang bersumber dari dana BOP/BOS dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan. Besarnya anggaran yang ada, diharapkan mampu di manajemen dengan baik dan transparan sehingga masyarakat ikut mengetahui penggunaan anggaran tersebut.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sedang berlangsung, semua bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab, seperti yang diinginkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Diakui dan disadari, bahwa pengelolaan sekolah yang baik memerlukan biaya yang besar dan mahal, sedangkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan sangat terbatas.

Bertolak dari kondisi tersebut Kepala SMA N I Bergas mencoba mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut. Sekolah wajib mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN/ APBD dalam membiayai kebutuhan sekolah. Komite sekolah dapat menerima sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari masyarakat. Kemudian, sumbangan sukarela dari masyarakat/perusahaan yang tidak mengikat dan tidak ada paksaan itu

hendaknya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar pembiayaan APBD/APBDN. Bentuk kebijakan itu adalah pembuatan perencanaan terpadu sumber dan penggunaan dana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Hal tersebut dimungkinkan sebab pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua siswa.

Dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan publik serta melaksanakan proses pendidikan yang demokratis dan berkeadilan pada tingkat satuan pendidikan, perlu diciptakan mekanisme dan studi khusus untuk mengungkap sistem pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan proses pendidikan yang transparan dan bertanggungjawab baik mengenai sumber-sumber dana maupun pola pengembangannya khususnya di SMA Negeri 1 Bergas.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan APBS di SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang yang dijabarkan ke dalam sub-sub fokus sebagai berikut.

1. Apa sumber-sumber pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Bergas?
2. Bagaimanakah pengalokasian biaya pendidikan SMA Negeri 1 Bergas?
3. Bagaimanakah peranan komite SMA Negeri 1 Bergas dalam pembiayaan pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran berkaitan dengan pengelolaan APBS di SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang.

1. Untuk mendeskripsikan tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Bergas.
2. Untuk mendeskripsikan pengalokasian biaya pendidikan SMA Negeri 1 Bergas.
3. Untuk mendeskripsikan peranan komite SMA Negeri 1 Bergas dalam pembiayaan pendidikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya dalam manajemen pengelolaan keuangan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pengurus Komite SMA Negeri 1 Bergas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran dasar dan umpan balik mengenai manajemen keuangan serta untuk meningkatkan kinerja anggaran pendidikan agar semakin lebih baik

- b. Bagi Kepala SMA Negeri 1 Bergas, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan sekolah.
- c. Bagi *Stakeholder*, hasil penelitian diharapkan menjadi sumber informasi mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pembiayaan pendidikan pada SMA Negeri 1 Bergas secara transparan dan akuntabel.

## **E. Daftar Istilah**

### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah**

Menurut Wahyusumidjo (2007: 315) anggaran belanja suatu sekolah pada dasarnya, adalah: pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan:

- a. penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam satu periode kebijaksanaan keuangan (fiskal);
- b. didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan, proses pendidikan, dan hasil sekolah yang direncanakan.

### **2. Pengelolaan Keuangan di Sekolah**

Dalam Mulyasa (2007: 47) dikatakan bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaran pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan.